

KATA PENGANTAR

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban dan menerangkan kinerja atau tindakan suatu lembaga / badan hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban atau keterangan. Oleh sebab itu sangatlah perlu suatu penilaian Akuntailitas Kinerja pada instansi pemerintah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berusaha meningkatkan pelayanan dibidang Penanggulangan Bencana dan Pemadaman Kebakaran di wilayah Kota Jambi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi ini dibuat sebagai tindak lanjut Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), berisi gambaran sejauh mana kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2017.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun begitu besar harapan kami laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam upaya bersama membangun Kota Jambi yang kita cintai dan bersama-sama meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Jambi. Kritik, saran serta masukan bagi kepentingan pembangunan Kota Jambi menuju Jambi Tahun Bangkit sangatlah kami harapkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Jambi, Januari 2018

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KOTA JAMBI**

Drs. H. A. RIDWAN, MSi
PembinaUtama Muda
NIP. 19661107 198512 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
C. Susunan Struktur Organisasi.....	6
D. Sumber Daya Manusia.....	7
E. Sarana dan Prasarana.....	10
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
1. Visi.....	17
2. Misi.....	18
3. Tujuan	19
4. Sasaran	19
5. Indikator Kinerja Utama.....	20
6. Strategi.....	21
7. Kebijakan	22
8. Program dan Kegiatan	23
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	38
B. Pencapaian Kinerja 2017	40
C. Akuntabilitas Keuangan	49

	D. Permasalahan dan Solusi	50
BAB IV.	PENUTUP	53
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaraan dan Penyelamatan	7
2. Tabel I. 2 Jumlah Pegawai Yang menduduki Jabatan dan Staf	8
3. Tabel I. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan.....	8
4. Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	9
5. Tabel I. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kekerjaan.....	10
6. Tabel I. 6 Sarana Posyankar, Fire Truck dan Jumlah Personil.....	11
7. Tabel I. 7 Mobil Operasional	12
8. Tabel I. 8 Kendaraan Pendukung Operasional.....	13
9. Tabel I. 9 Sarana Pompa	15
10. Tabel I. 10 Sarana Proteksi Diri Personil.....	15
11. Tabel I. 11 Sarana Peralatan Perbengkelan	16
12. Tabel II. 1 Indikator Kinerja Utama.....	20
13. Tabel II. 2 Daftar Program dan Kegiatan	23
14. Tabel II. 3 Penetapan Kinerja Tahun 2017.....	27
15. Tabel III. 1 Laporan Capaian Target IKU RPJMD Jambi Tahun 2017.....	39
16. Tabel III. 2 Capaian Kinerja BPB dan DAMKAR Tahun 2017.....	40
17. Tabel III.3 Distribusi dan Sumber dana Tahun 2017	49
18. Tabel III.4 Realisasi Penggunaan APBD 2017	50

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

1. Undang-Undang :

- UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Pemukiman;
- UU no. 4 Tahun 1998 tentang Rumah Susun;
- UU Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- UU Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47) ;
- UU Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- UU Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- UU Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

2. Peraturan Pemeritah :

- Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor : 36 Tahun 2002 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Permen PU No. 54/PRT/1991 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana Jalan Lingkungan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah :

- PERDA Kota Jambi No. 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan, Pengujian dan Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran;
- PE
- PERDA Kota Jambi No. 8 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) ;
- Peraturan Walikota Jambi No. 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.

4. Petunjuk Teknis :

- Kepmeneg PU No. 441/KPTS/1988 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- Kepmeneg PU No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
- Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, BAB II Pasal 2 Ayat 18 tentang Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat Sub Kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan pemadam kebakaran dan bencana lainnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan pemadam kebakaran dan bencana lainnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan pemadam kebakaran dan bencana lainnya;
4. Penyelenggaraan pendataan, pemetaan, pencegahan, pengawasan, pengendalian, penanggulangan dan penyelamatan

- di bidang pemadam kebakaran dan bencana lainnya;
5. Pemberian rekomendasi kelaikan bangunan terhadap antisipasi ancaman bencana kebakaran dan bencana lainnya;
 6. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Dalam fungsi koordinasi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Pada fungsi komando, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi melaksanakan penanggulangan bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Sedangkan pada fungsi pelaksana, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain fungsi dimaksud, secara khusus di Kota Jambi penanganan pemadaman kebakaran menjadi salah satu fungsi yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota

Jambi yang semula fungsi ini berada pada SKPD Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi.

C. SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Bidang Pencegahan dan Peran Serta Masyarakat terdiri atas :
 - Seksi Pecegahan
 - Seksi Pendidikan dan Pelatihan
 - Seksi Peran Serta Masyarakat
- d. Bidang Sarana terdiri dari ;
 - Seksi Pengadaan;
 - Seksi Pergudangan dan Pendistribusian ;
 - Seksi Pengendalian Sarana.
- e. Bidang Operasi dan Penyelamatan, terdiri atas :
 - Seksi Rencana Operasional ;
 - Seksi Operasional dan Penyelamatan ;
 - Seksi Investigasi dan Sistem Proteksi Kebakaran Kota.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Kondisi Umum Pegawai

Jumlah personil di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi sebanyak 222 orang yang terdiri 85 orang PNS dan 137 orang pegawai honor. Dari jumlah PNS sebanyak 85 orang tersebut, 16 orang adalah pejabat struktural, 39 orang pelaksana administrasi dan 30 orang anggota pemadam kebakaran. Selain pegawai juga terdapat relawan satuan tugas penanggulangan bencana yang berjumlah 137 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

No.	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1	PNS	85	38,29
2	Kontrak/ Honoror	137	61,71
	JUMLAH	222	100

1. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan dan Staf

Dari 222 orang PNS yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi sebanyak 16 orang, meliputi : 1 orang pejabat Eselon II, 4 orang pejabat Eselon III dan 11 orang pejabat Eselon IV. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel I.2. Jumlah pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

No	Jabatan/ Staf	Jumlah (Orang)	%
1	Eselon II	1	1,18
2	Eselon III	4	4,71
3	Eselon IV	11	12,94
4	Staf Administrasi	39	45,88
5	Satgas	30	35,29
	Jumlah	85	100

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/ Pangkat

Bilamana dilihat dari golongan/pangkat, dari 85 pegawai yang ada, golongan IV sebanyak 6 orang (7,06 %), golongan III sebanyak 35 orang (41,18 %), golongan II sebanyak 43 orang (50,59 %), dan golongan I sebanyak 1 orang (1,18 %). Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel I.3. Jumlah pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah (Orang)	%
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1,18
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	3	3,53
3	Pembina (IV/a)	2	2,35
4	Penata Tk I (III/d)	8	9,41
5	Penata (III/c)	9	10,59
6	Penata Muda Tk I (III/b)	9	10,59
7	Penata Muda (III/a)	9	10,59
8	Pengatur Tk. I (II/d)	3	3,53
9	Pengatur (II/c)	28	32,94
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	10	11,76
11	Pegatut Muda (II/a)	2	2,35
12	Juru Tk. I (I/c)	1	1,18
	Jumlah	85	100

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 51,76 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SMP dan SD sebesar 2,35 %.

Tabel I.4. Jumlah pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi berdasarkan Pendidikan tahun 2017.

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1	Starata - 2 (S2)	3	3,53
2	Starata - 1 (S1)	34	40,00
3	Sarjana Muda (D1/D2)	2	2,35
4	SLTA/SMK	44	51,76
5	SLTP	0	0,00
6	SD	2	2,35
	Jumlah	85	100

4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 3,53 % pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 2 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 40,00 % yang terdiri dari 5 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel I.5. Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi berdasarkan Jenis Kesarjanaan

No	Kesarjanaan/ Disiplin Ilmu	Jumlah (Orang)
A.	MAGISTER	
	1. Ilmu Administrasi	-
	2. Magister Scient	1
	3. Magister Ekonomi	2
	4. Magister Profesional	-
B.	SARJANA	
	1. Ilmu Hukum	-
	2. Kesejahteraan Sosial	1
	3. Ekonomi	12
	4. Teknik Mesin	1
	5. Manajemen	22
C.	SARJANA MUDA	
	1. Administrasi	-
D.	KEJURUAN	15
E.	UMUM (SLTA, SLTP, SD)	31
	JUMLAH	85

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan klasifikasi kedisiplinan ilmu, pegawai yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi belum ada yang secara khusus memiliki disiplin ilmu tentang kebencanaan

E. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah tersedia Sarana dan Prasarana seperti yang terlihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel I.6 Sarana Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran, Fire Truck dan Jumlah Personil Satuan Tugas Siaga Tahun 2017

No	Lokasi Posyankar	Fasilitas Pendukung			Keterangan
		Armada	Total Satgas	Satgas Siaga	
1	Markas Komando Damkar	8 Unit	82 Orang	27 Orang/Hari	4 FT Baik, 1 Rusak, 1 Supply
2	Posyankar Jambi Selatan	1 Unit	20 Orang	6 Orang/Hari	1 FT Baik
3	Posyankar Jambi Kota Seberang	1 Unit	20 Orang	6 Orang/Hari	1 FT Baik
4	Posyankar Jambi Timur	1 Unit	20 Orang	6 Orang/Hari	1 FT Baik
5	Posyankar Kota Baru	1 Unit	17 Orang	6 Orang/Hari	1 FT Baik
6	Posyankar Pelayangan	- Unit	- Orang	- Orang/Hari	Pondasi dan Lantai

Rasio Norma :

1 Posyankar = 2 Fire Truck, 12 Personil

Tabel.I.7 Mobil Operasional Utama Pemadaman Kebakaran Kota Jambi Tahun 2017

No	Kendaraan Operasional	Merk	Jumlah	Keterangan
1	Mobil Resque	Ford	1 Unit	Bantuan BNPB Tahun 2014
2	Mobil Pompa/ Fire Truck	Isuzu	1 Unit	Keluaran Tahun 1977
3	Fire Truck 10.000 Liter	Fuso	1 Unit	Keluaran Tahun 1978/ Rusak
4	Fire Truck 10.000 Liter	Isuzu	1 Unit	Keluaran Tahun 1983/ Rusak Berat
5	Fire Truck 5.000 Liter	Mercy 1971	1 Unit	Keluaran Tahun 1995/ Rusak Berat
6	Fire Truck 5.000 Liter	Mercy	1 Unit	Keluaran Tahun 1996
7	Fire Truck 10.000 Liter	Mitsubishi Fuso 190/PS	1 Unit	Keluaran Tahun 2003
8	Fire Truck 5.000 Liter	Isuzu	2 Unit	Keluaran Tahun 2004
9	Fire Truck 10.000 Liter	Mitsubishi Fuso	1 Unit	Keluaran Tahun 2006
10	Fire Truck 5.000 Liter	Isuzu	1 Unit	Hibah Provinsi Tahun 20011
11	Fire Truck 3.000 Liter	Hino Dutro	1 Unit	Keluaran Tahun 2012
12	Fire Truck 3.000 Liter	Hino Dutro	2 Unit	Pengadaan Tahun 2014
13	Gerobak Motor Pemadam	VIAR	1 Unit	Pengadaan Tahun 2014

14	Fire Truck 4.000 Liter	Hino Doble Kabin	1 Unit	Pengadaan Tahun 2016
15	Fire Truck 4.000 Liter	Matra	1 Unit	APBD Pem.Prov Jambi T.A 2017
	TOTAL		17 Unit	

Tabel.1.8 Kendaraan Pendukung Operasional Pemadam Kebakaran Tahun 2017

No	Kendaraan Pendukung Operasional	Merk	Jumlah	Keterangan
1	Mobil Komando	Isuzu Fanther	1 Unit	Keluaran Tahun 2006
2	Mobil Patroli	Toyota Kijang	1 Unit	Keluaran Tahun 2006
3	Sekretaris	Kijang Inova	1 Unit	Keluaran Tahun 2008
4	Mobil Komando	Dobel Cabin	1 Unit	Keluaran Tahun
5	Mobil Angkut Pasukan	Isuzu ELF/Mini Bus	1 Unit	Keluaran Tahun 2007
7	Speed Boat	Jhonson	1 Unit	25 K/HP (Rusak)
8	Escortee / Motor Patroli	Happy Motor	2 Unit	Keluaran Tahun 2008
9	Mobil Kaban	Mitshubishi Strada	1 Unit	Keluaran Tahun 2013
10	Mobil Dapur Umum	Isuzu	1 Unit	Bantuan BNPB 2016
11	Mobil Dalmas	Isuzu	1 Unit	Tahun 2012
12	Sepeda Motor Dinas	Honda Star	2 Unit	Keluaran Tahun 1994

LAKIP DAMKAR 2017

13	Sepeda Motor Dinas	Yamaha MX	5 Unit	Keluaran Tahun 2013
14	Sepeda Motor Dinas	Yamaha MX	5 Unit	Pengadaan Tahun 2016
15	Perahu Karet	Colombus	1 Unit	Hibah Provinsi 2012
16	Perahu Karet	Colombus	2 Unit	Pengadaan 2016
17	Perahu Karet	Colombus	2 Unit	Bantuan BNPB 2016
18	Mesin Tempel Perahu	Suzuki	1 Unit	25 PK (Pengadaan 2016)
19	Mobil double cabin	Mitsubishi	1 Unit	Keluaran tahun 2013
20	Mobil Logistik	Mitsubishi PS	1 Unit	Keluaran Tahun 2013
21	Chinsaw Kayu	0	2 Unit	Pengadaan Tahun 2013
22	Pemecah Beton	0	2 Unit	Pengadaan Tahun 2013
23	Pemotong Besi	0	2 Unit	Pengadaan Tahun 2013
24	Mobil Dapur Umum	Hino Dutro	1 Unit	Bantuan BNPB Tahun 2016
25	Motor Trill	Kawasaki	2 Unit	Bantuan BNPB Tahun 2016
26	Chinsaw	0	2 Unit	Bantuan BNPB Tahun 2016
27	Gengset	0	1 Unit	Bantuan BNPB Tahun 2016
28	Senter	0	5 Unit	Bantuan BNPB Tahun 2016

Tabel I.9 Sarana Pompa Pemadaman Kebakaran Tahun 2017

No	Kendaraan Pendukung Operasional	Merk	Jumlah	Keterangan
1	Pompa Fortable	Tohatso	2 Unit	Tahun 2004
2	Ploto Pump	Waterous	3 Unit	Keluaran tahun 2007
3	Pompa Fortable	Waterrous	1 Unit	Pengadaan Tahun 2016
	TOTAL		6 Unit	

Tabel. I.10 Sarana Proteksi Diri Personil Pemadaman Kebakaran dan Pendukung Lainnya

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KET
1	Breathing apparatus	7 unit	2 Rusak
2	Baju tahan api	7 unit	4 Rusak
3	Baju tahan Panas	70 Unit	
4	Helmet Pasukan	70 Buah	
5	Sepatu pengaman Boots	70 Buah	
6	Kapak Personil	15 pasang	
7	Peralatan Outbond	1 Set	
8	Tangga rool	2 buah	
9	Bimatic Protecta Resque	2 buah	
10	Jaket Tahan Panas		
11	Pesawat Righ/HT	3 buah/42 buah	
12	Pesawat telepon No.113 dan 41171	6 Buah	

Tabel I. 11 Sarana Peralatan Perbengkelan Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

No	Jenis	Type	Banyaknya	Ket
1	Refilling Fire Extinguisher + termo		1 buah	
2	Rapper Ropes		1 rool	
3	APK jinjing		13 Tabung	
4	Kunci pipa		1 buah	
5	Kunci Inggris		10 buah	
6	Kunci ring		1 set	
7	Kunci Pas		2 Set	
8	Tool box 2 step		1 set	
9	Kompresor		1 Unit	
10	Mesin Las		1 Unit	
11	Dongkrak		3 Unit	
12	Stang stell		2 Unit	
13	Cas Aki		1 Unit	
14	Las Listrik		1 Unit	
15	Bor Mesin		21 Unit	
16	Mesin Pembuka Baut Ban		1 Unit	
17	Bor Mesin Duduk		1 Unit	
18	Ragum Besar		1 Unit	
19	Gunting Besi Plat		1 Set	

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. MISI

Dalam rangka mendukung Visi Kota Jambi dan sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menetapkan Visi :

“ Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi yang Siaga, Tanggap dan Berdaya terhadap Bencana”

Makna pernyataan Visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi di atas adalah :

- **Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan** Kota Jambi adalah Institusi pemangku kepentingan Penyelenggaraan atas Penanggulangan Bencana di wilayah Kota Jambi.
- **Siaga** adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi selalu mempersiapkan diri pra bencana baik personil maupun sarana dan prasarannya.
- **Tanggap** artinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi yang memiliki kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana.
- **Berdaya** artinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mempunyai kekuatan, kemampuan, kecepatan, dan ketangguhan dalam menanggulangi bencana.
- **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

1. Memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan korban bencana.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan personil satuan tugas.
3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat, swasta dan Instansi Pemerintah dalam bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan Rekondisi korban bencana.
4. Meningkatkan penyediaan bahan logistik, sarana dan prasarana kebencanaan.
5. Membangun Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terencana, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan.

3. TUJUAN

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan. Berdasarkan hal tersebut tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi selaras dengan perkembangan pembangunan kota dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan Kualitas SDM aparatur yang mampu memenuhi standar pelayanan minimal dibidang penanggulangan kebakaran (respon time 15 menit ke TKK) dan peningkatan Kapasitas cakupan pelayanan kebakaran.
3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam bidang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan dari Bencana pada Lingkungan terkecil satuan masyarakat (RT/RW/Kelurahan).
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi selaras dengan perkembangan kapasitas kelembagaan sejalan dengan Pertumbuhan pembangunankotajambi secara keseluruhan.
5. Terbangunnya Sistem koordinasi antar instansi dalam rangka Pencegahan Terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan dan Pemulihan akibat Bencana.

4. SASARAN

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, terkait erat dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kota Jambi. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Keterpaduan Pembangunan Kota Jambi , Lingkungan, Perumahan, bangunan Gedung Publik service yang aman dan nyaman sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
2. Terwujudnya Pos Pelayanan Kebakaran dan UPT Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi di setiap Kecamatan serta terwujudnya peningkatan Sarana dan Prasarana yang efektif dan efisien (Wilayah Manajemen Kebakaran).
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup perkotaan melalui sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif pada gedung serta peran serta masyarakat
4. Terwujudnya Standarisasi Kompetensi SDM Aparatur yang memiliki Sertifikat Keahlian Pemadam Kebakaran dan Keahlian Teknis Bencana.
5. Terbangunnya sistem pencegahan terhadap bencana
6. Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan akibat bencana secara terencana, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan.

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

TABEL II.1 Indikator Kinerja utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi yang terdapat dalam RPJMD kota Jambi 2014 – 2018 :

Target Sasaran Hasil Pembangunan	2018	20
	2017	20
	2016	20
	2015	20
	2014	20
Satuan	Persen	
Program	Program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan	

INDIKATOR KINERJA UTAMA/SASARAN HASIL PEMBANGUNAN	Rasio Peningkatan pelayanan kebencanaan
	29,1
SASARAN	Peningkatan Cakupan Pelayanan Kebencanaan
	29
MISI, TUJUAN	Misi 5, Tujuan 1 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal
NO	

6. STRATEGI

Strategi yang digunakan dalam mencapai Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi adalah dengan Strategi Peningkatan peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi dalam Pengembangan Tata Ruang dan Tata Bangunan, Peningkatan SDM Aparatur, Penyediaan Logistik dan Sarana Prasarana Bencana serta Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan korban bencana. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Jambi serta meningkatkan peran serta masyarakat yang berdasarkan kondisi dan potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat Kota Jambi.

7. KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi 2013-2018 ditetapkan suatu kebijaksanaan yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Sesuai dengan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan kebijaksanaan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dalam penanggulangan dan penyelamatan bencana.
- b. Peningkatan sinergi pelaksanaan penanggulangan bencana dengan instansi terkait, swasta dan masyarakat.
- c. Memberdayakan dan meningkatkan inisiatif dan inovasi pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.
- d. Meningkatkan kapasitas pelayanan kota dengan membangun pos-pos pelayanan penanggulangan bencana kebakaran di setiap kecamatan.
- e. Prioritaskan pada peningkatan pelayanan pencegahan bencana yang berbasis masyarakat
- f. Prioritas pada peningkatan pelayanan penanggulangan dan rehabilitasi rekonstruksi akibat bencana yang berbasis masyarakat
- g. Menjadikan PUSDALOPS sebagai pusat informasi Kebencanaan
- h. Menambah jumlah personil satuan tugas pemadam kebakaran melalui Progam Rekrutmen Tenaga Sukarela Bencana Kebakaran (Tenaga Kontrak Kebakaran-Balakar).
- i. Optimalisasi, efisiensi dan efektifitas staf dan satuan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi serta peningkatan kemampuan melalui diklatsar, diklat lanjutan keahlian pemadam dan keahlian teknis Bencana.
- j. Penambahan Jumlah dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Bencana.
- k. Prioritas penurunan intensitas kebakaran melalui Kampanye Rutin Kebakaran.
- l. Memberikan jaminan keselamatan kerja dan insentif untuk satuan

- tugas penanggulangan bencana.
- m. Prioritas Kewajaran Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi APK/APAR dan Rekomendasi IMB.

8. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel II.2 Daftar Kegiatan Per Program Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi (sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2006)

No	Nama Program / Nama Kegiatan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Terdiri dari Kegiatan :
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10	Penyediaan alat tulis kantor
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14	Penyediaan peralatan rumah tangga
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
16	Penyediaan bahan logistik kantor
17	Penyediaan makanan dan minuman
18	Perjalanan Dinas

	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Terdiri dari Kegiatan :		
	1	Pembangunan rumah jabatan
	2	Pembangunan rumah dinas
	3	Pembangunan gedung kantor
	4	Pengadaan mobil jabatan
	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
	6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
	8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
	9	Pengadaan peralatan gedung kantor
	10	Pengadaan mebeleur
	11	Pengadaan peralatan perkantoran
	12	Pembangunan gudang kantor
	13	Pembangunan tempat paker
	s/d
	19	dst.....
	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
	30	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
	s/d	0
	39	dst.....
	40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

	41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
	42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
	43	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
	45	dst.....
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur; Terdiri dari Kegiatan :	
	1	Pengadaan mesin/kartu absensi
	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
	3	Pengadaan pakaian kerja lapangan
	4	Pengadaan pakaian KORPRI
	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
	6	dst.....
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Terdiri dari Kegiatan :	
	1	Pendidikan dan pelatihan formal
	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
	4	Penilaian Angka Kredit
	5	dst.....
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Terdiri dari Kegiatan :	
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran
	3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
	5	dst.....

6. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
Terdiri dari Kegiatan :
1 Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
2 Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
3 Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung
4 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
5 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
6 Kegiatan rekrutment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
7 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
8 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
9 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
10 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
11 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
12 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan lainnya
13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7. Program Perencanaan SKPD
Terdiri dari :
1 Penyusunan Rencana Strategis SKPD
2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

B. PENETAPAN KINERJA 2017

Berdasarkan PENETAPAN KINERJA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi TAHUN 2017 dapat dilihat capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Tahun

2017 pada tabel dibawah ini

Tabel. II.3 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
Terwujudnya Keterpaduan Pembangunan Kota Jambi, Lingkungan, Perumahan, Bangunan Gedung Publik Service yang aman dan nyaman sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku	Cakupan Pelayanan Kebencanaan	20%
Terwujudnya Pos Pelayanan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di setiap Kecamatan serta terwujudnya peningkatan Sarana dan Prasarana yang efektif dan efisien (Wilayah Manajemen Kebakaran)	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time)	20%
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup perkotaan melalui sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif pada gedung serta peran serta masyarakat	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	20%
Terwujudnya Standarisasi Kompetensi SDM Aparatur yang memiliki Sertifikat Keahlian Pemadam Kebakaran dan Keahlian Teknis Bencana	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	20%

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian Kinerja
2017:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat
Pendanaan : Rp 7.500.000,00
Dengan target pekerjaan antara lain adalah :
 - pembelian materai 6.000 sebanyak 350 lembar dan materai 3.000 sebanyak 300 lembar
 - pembayaran honorarium 1 orang petugas ekspedisi selama 12 bulan.
 - Pembayaran honorarium 1 orang petugas pengarsip surat selama 12 bulan.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik
Pendanaan : Rp 182.400.000,00
Dengan target pekerjaan antara lain adalah :
 - pembayaran rekening telepon Mako & 4 Posyankar,
 - pembayaran rekening air Mako & 2 Posyankar,
 - pembayaran rekening listrik Mako & 4 Posyankar,

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Pendanaan : Rp 660.000,00
Dengan target pekerjaan adalah :
 - pembayaran retribusi PPP-APK tahun 2017.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional.
Pendanaan : Rp 68.000.000,00
Dengan target pekerjaan adalah :
 - Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Pemadam

Kebakaran Kota Jambi sebanyak 17 Kendaraan Mobil Dinas , Motor 7 buah sepeda motor

- Asuransi Kendaraan Dinas 17 Kendaraan Mobil Dinas.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

Pendanaan : Rp 260.955.000,00

Dengan target pekerjaan adalah :

- Honorarium tim pengadaan barang dan jasa ;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) = 1 Orang, 12 bulan
 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa = 1 Orang, 12 bulan
 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan = 1 Orang, 12 bulan
 - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan = 3 Orang, 2 paket
 - Pengurus Barang Pengguna = 1 Orang, 12 Bulan
 - Pembantu Pengurus Barang Pengguna = 1 Orang, 12 Bulan
- Honorarium tim pengelolaan keuangan ;
 - Pengguna Anggaran (PA) = 1 Orang, 12 bulan
 - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) = 1 Orang, 12 bulan
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) = 8 Orang, 12 bulan
 - Bendahara Pengeluaran = 1 Orang, 12 bulan
 - Bendahara Penerimaan = 1 Orang, 12 bulan
 - Bendahara Pengeluaran Bencana = 1 Orang, 12 bulan
 - Staf Pengelola Keuangan = 10 Orang, 12 bulan
 - Pengurus Gaji = 1 Orang, 12 bulan
- Honorarium Operator SIPKD = 3 Orang, 12 bulan
- Honorarium Admin Administrasi Pembangunan = 2 Orang, 12

bulan

- Belanja Alat Tulis Kantor

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pendanaan : Rp 72.000.000,00

Dengan target pekerjaan antara lain adalah :

- pembelian peralatan kebersihan,
- pembayaran honorarium 4 org petugas cleaning service selama 12 bulan

7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pendanaan : Rp 27.500.000,00

Dengan target pekerjaan adalah :

- Terpenuhinya alat tulis kantor untuk 1 tahun.

8. Kegiatan Penyediaan Barang percetakan dan penggandaan

Pendanaan : Rp 26.045.000,00

Dengan target pekerjaan adalah :

- pengadaan Kop Surat 20 Rim,
- pengadaan kop disposisi sebanyak 15 Rim,
- pengadaan spanduk sebanyak 15 buah spanduk,
- pengadaan kartu layak pakai sebanyak 1.800 lembar,
- pengadaan amplop dinas sebanyak 25 kotak,
- Pengadaan Karcis Retribusi Damkar 120 Buku
- Pengadaan Map Dinas 350 Buah
- dan foto copy sebanyak 23.280 Lembar

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Pendanaan : Rp 16.000.000,00

- Pengadaan Lampu Hemat Energi 110 buah
- Pengadaan Kabel 2 x 15 mm 3 roll
- Saklar, socket, terminal dan alat listrik lainnya 1 Tahun
- Baterai Besar, baterai kecil,

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pendanaan : Rp 12.000.000,00

- Pengadaan Kipas Angin sebanyak 6 Unit

11. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pendanaan : Rp 41.000.000,00

Dengan target pekerjaan adalah :

- Pengadaan Sprey, Kasur dan Bantal

12. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Pendanaan : Rp 16.800.000,00

Dengan target pekerjaan adalah :

- pengadaan makanan dan minuman tamu selama 1 tahun,
- Pengadaan makan dan minum rapat untuk 1 tahun

13. Kegiatan Perjalanan Dinas

Pendanaan : Rp 262.500.000,00

Dengan target pekerjaan adalah :

- Perjalan Dinas Dalam daerah untuk 1 tahun
- Perjalan Dinas Luar Daerah untuk 1 Tahun.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasara Aparatur.

1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pendanaan : Rp 26.000.000,00

Dengan targer pekerjaan adalah :

- Pengadaan Hordeng Jendela
- Pengadaan Teralis

2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran

Pendanaan : Rp 41.000.000,00

- Pengadaan Papan Merk Pos Kotabaru
- Pengadaan Laptop dan Printer
- Pengadaan Infokus

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas / Operasional

Pendanaan : Rp 495.800.000,00

Dengan target pekerjaan adalah :

- *BBM dan Pelumas operasional Kendaraan dinas / kendaraan operasional pemadaman sebanyak 12 unit,*
- *BBM dan Pelumas Kendaraan Roda- 4 ;Mobil Dalmas dan Mobil Dapur Umum sebanyak 8 unit*
- *BBM dan Pelumas Kendaraan Roda- 2 dan Roda- 3 sebanyak 18 unit*
- *BBM dan Pelumas Mesin Fortable, Speed Boot ,Pompa Apung dan Sinso sebanyak 6 unit*
- *BBM dan Pelumas Speed Boot sebanyak 2 Unit*

4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pendanaan : Rp 15.000.000,00

Dengan target pekerjaan antara lain adalah :

- *Pemeliharaan peralatan/perlengkapan gedung kantor*

5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala alat-alat kantor

Pendanaan : Rp 10.000.000,00

Dengan target pekerjaan antara lain adalah :

- *service Peralatan elektronik selama setahun,*

6. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Pendanaan : Rp 246.700.000,00

Dengan target pekerjaan antara lain adalah :

- *Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Pengecatan Gedung Kantor*
- *Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Rehab Tower*
- *Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Rehab Flapon Atap Ruangan*

- *Pengecatan Gedung Kantor*
- *Rehab Flapon Atap Ruangan Aula*
- *Rehab Tower Simulasi Kebakaran*

7. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Pendanaan : Rp 100.000.000,00

Dengan target pekerjaan antara lain adalah :

- *Pengecatan 2 Unit Kendaraan Operasional dan Rehab Kabel*

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Pendanaan : Rp 16.500.000,00

Dengan target pekerjaan antara lain adalah :

- *Pengadaan Pakaian Olahraga Kaos Oblong Damkar 220 Buah*

2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Pendanaan : Rp 186.800.000,00

Dengan target pekerjaan antara lain adalah :

- *Pengadaan Baju Tahan Panas sebanyak 30 Set*

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendanaan : Rp 20.000.000,00

Dengan target pekerjaan antara lain adalah :

- *Kursus singkat/ pelatihan*

2. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan – perundangang

Pendanaan : Rp 50.000.000,00

Dengan target pekerjaan antara lain adalah :

- *SPPD Luar Daerah*
- *Setoran Kursus -kursus Singkat/ Pelatihan*

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan pencapaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD.
Pendanaan : Rp 30.385.000,00
Dengan target pekerjaan antara lain adalah :
 - *Penyusunan Buku Laporan Tahunan, 1 Dokumen*
 - *Penyusunan LAKIP, 1 Dokumen*
 - *Penyusunan LPPD, 1 Dokumen*

VI. Program Perencanaan SKPD

1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Pendanaan : Rp 2.500.000,00
 - Dokumen Rencana Kerja SKPD Tahun 2017

VII. Program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan

1. Kegiatan Bimbingan Teknis, Diklat dan Sosialisasi Penanganan Bencana
Pendanaan : Rp 187.040.000,00
Dengan Target Kegiatan :
 - Pelaksanaan Diklat
 - Sosialisasi penyuluhan keliling tentang kebencanaan
 - Pelaksanaan gladi dan simulasi bencana
2. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran
Pendanaan : Rp 43.875.000,00
Dengan Target Kegiatan :

- Tim Koordinasi Perizinan Pemanfaatan Gedung, 1 Tahun
 - Tim retribusi PPP-APK
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan
Pendanaan : Rp 1.812.718.000,00
Dengan Target Pekerjaan Antara Lain :
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan
 - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan
 - Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Komunikasi
 - Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Persenjataan/Keamanan
 - Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Penanggulangan Bencana
 - Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor
4. Pengadaan Logistik Mitigasi Bencana
Pendanaan : Rp 46.022.000,00
Dengan Target Antara Lain :
- Belanja Alat Tulis Kantor
 - Belanja Makanan dan Minuman Posko Kebencanaan dan Operasi Tanggap Bencana
5. Program Pencegahan dan Pengendalian Kebencanaan
Pendanaan : Rp 211.300.000,00
Dengan Target Antara Lain :
- Honorarium Tim Penanganan Bencana Non Kebakaran (PNS dan Non PNS)
 - Belanja Barang Dan Jasa
 - Belanja Cetak dan Penggandaan
6. Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana
Pendanaan : Rp 137.350.000,00
Dengan Target Antara Lain :

- Honorarium Panitia Penilaian Kerusakan Dan Kerugian Korban Bencana PNS dan Non PNS
 - Honorarium Tim Fasilitas Dan Koordinasi Bantuan Korban PNS dan Non PNS
 - Belanja Barang dan Jasa
 - Belanja Cetak dan Penggandaan
 - Belanja Makan dan Minum
 - Belanja Jasa Tenaga Perorangan
7. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran
Pendanaan : Rp 1.189.710.000,00
Dengan Target Antara Lain :
- Honorarium Tim Pelaksanaan Incident Komander PNS
 - Honorarium Pengamanan Hari-Hari Besar Dan Kebersihan Lingkungan PNS dan Non PNS
 - Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pemadaman PNS dan Non PNS
 - Belanja Barang Dan Jasa
 - Belanja Cetak dan Penggandaan
 - Belanja Makan dan Minum
8. Kemitraan Asuransi Jiwa dan Kesehatan Satuan Tugas Kebencanaan
Pendanaan : Rp 27.500.000,00
Dengan Target Antara Lain :
- Belanja Alat Tulis Kantor
 - Belanja Premi Asuransi
9. Kegiatan Rekrutmemt Tenaga Sukarela Penanggulangan Bencana
Pendanaan : Rp 2.608.650.000,00
Dengan Target Antara Lain :
- Honorarium Tenaga Kerja Kontrak (TKK)

10. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan

Pendanaan : Rp 200.000.000,00

Dengan Target Antara Lain :

- Belanja Alat Tulis kantor
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

11. Monitoring, Evaluasi,dan Pelaporan

Pendanaan : Rp 136.440.000,00

Dengan Target Antara Lain :

- Honorarium Petugas Korsik
- Honorarium Tim Evaluasi Ketangkasan Satgas PNS dan Non PNS
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Cetak dan Penggandaan
- Belanja Makanan Dan Minuman
- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Evaluasi kinerja yang dilakukan saat ini merupakan program yang berstandar kepada Rencana Strategis untuk dipedomani. Evaluasi kinerja dilakukan dengan menghitung capaian kinerja, evaluasi kegiatan yang meliputi Input, Out Put, Out Comes, Benefit dan Impact (untuk sementara ini hanya dilakukan sampai pada tingkat Out Comes saja), Evaluasi Program dan Evaluasi Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi tahun 2017 dengan menggunakan penekanan yang sama.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan Indikator Masukan (Input), Keluaran (Out put), Hasil (Out Comes), Manfaat (Benefit) dan Dampak (Impact). Adapun pengertian dari masing - masing indikator tersebut adalah :

1. Indikator Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (Out put) Indikator ini dapat berupa dana, SDM, Informasi kebijakan/ Peraturan perundang-undangan dan sebagainya
2. Indikator Keluaran (Out put) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non Fisik
3. Indikator Hasil (Out Comes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (yang mempunyai dampak langsung).

4. Indikator manfaat (Benefit) adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator Dampak (Impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja dipergunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan satu kegiatan atau program atau kebijaksanaan sesuai dengan indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan MISI dan VISI yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kota Jambi.

**Tabel III.1 LAPORAN CAPAIAN TARGET IKU RPJMD JAMBI
TAHUN 2017**

SPKD : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

MISI 5 DAN Tujuan 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal					Keterangan
SASARAN	IKU	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	
Mewujudkan Kota Tanggap Bencana melalui penanganan dan pencegahan bencana	Mengurangi dampak bencana kebakaran dan bencana lainnya	Persen	20%	30%	Pengadaan 1 Unit Kendaraan Operasional Pemadaman pada Tahun Anggaran 2017 pada APBD Murni.

B. PENCAPAIAN KINERJA 2016

Tabel .III.2 Capaian Kinerja BPB dan DAMKAR Kota Jambi Tahun 2017 berdasarkan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	REALISASI 2016
Terwujudnya Keterpaduan Pembangunan Kota Jambi, Lingkungan, Perumahan, Bangunan Gedung Publik Service yang aman dan nyaman sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku	Cakupan Pelayanan Kebencanaan	20%	20%
Terwujudnya Pos Pelayanan Kebakaran dan UPT Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi di setiap Kecamatan serta terwujudnya peningkatan Sarana dan Prasarana yang efektif dan efisien (Wilayah Manajemen Kebakaran).	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time)	20%	20%
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup perkotaan melalui sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif pada gedung serta peran serta masyarakat	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	20%	30%

Terwujudnya Standarisasi Kompetensi SDM Aparatur yang memiliki Sertifikat Keahlian Pemadam Kebakaran dan Keahlian Teknis Bencana	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	20%	20%
--	---	-----	-----

Penilaian terhadap pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja rencana dengan kinerja riil, sehingga pada akhirnya dapat digambarkan nilai capaian kegiatan atau kelompok kegiatan, indikator kinerja, nilai capaian akhir kegiatan, nilai capaian akhir program dengan nilai capaian akhir kebijaksanaan. Kesimpulan pencapaian indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi tahun 2016 secara kuantitatif dari 43 (Empat Puluh Tiga) kegiatan yang dapat direalisasikan sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) kegiatan, dengan perhitungan kinerja sebagai berikut :

Prosentase Kemajuan Kinerja Kegiatan =

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase} \\ \text{Kemajuan} \\ \text{Kinerja} \\ \text{Kegiatan} \end{array} = \frac{\text{Jumlah Kegiatan yg dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan Keseluruhan}} \times 100\%$$

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase} \\ \text{Kemajuan} \\ \text{Kinerja} \\ \text{Kegiatan T.A.} \\ \text{2017} \end{array} = \frac{43 \text{ (Empat puluh tiga) Kegiatan}}{43 \text{ (Empat puluh tiga) Kegiatan}} \times 100\%$$

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase} \\ \text{Kemajuan} \\ \text{Kinerja} \\ \text{Kegiatan TA.} \\ \text{2017} \end{array} = 100 \% \text{ (Seratus persen)}$$

Dan dari semua kegiatan yang diselenggarakan BPB dan Damkar pada Tahun Anggaran 2017 ini, realisasi tingkat capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat

- Jumlah anggaran Rp 7.500.000
- Realisasi fisik 85%
- Realisasi keuangan Rp 6.399.000

Terlaksananya Kegiatan surat menyurat selama 1 Tahun dengan jumlah surat yang terkirim 720 surat.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik

- Jumlah anggaran Rp 182.400.000
- Realisasi fisik 66%
- Realisasi keuangan Rp 121.121.708

Terlaksananya pembayaran rekening telepon, listrik dan air. Khusus

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Jumlah anggaran Rp 660.000
- Realisasi fisik 100%
- Realisasi keuangan Rp 660.000

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional.

- Jumlah anggaran Rp 68.000.000
- Realisasi fisik 43%
- Realisasi keuangan Rp 29.543.800

Keterangan Pada Asuransi Kendaraan tidak terealisasi

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- | | | |
|--------------------|----|------------|
| Jumlah anggaran | Rp | 12.000.000 |
| Realisasi fisik | | 100% |
| Realisasi keuangan | Rp | 11.946.000 |
- Ketrangan :
11. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- | | | |
|--------------------|----|------------|
| Jumlah anggaran | Rp | 41.600.000 |
| Realisasi fisik | | 100% |
| Realisasi keuangan | Rp | 41.544.800 |
- Keterangan :
12. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- | | | |
|--------------------|----|------------|
| Jumlah anggaran | Rp | 16.800.000 |
| Realisasi fisik | | 42% |
| Realisasi keuangan | Rp | 6.972.000 |
- Keterangan :
13. Kegiatan Perjalanan Dinas
- | | | |
|--------------------|----|-------------|
| Jumlah anggaran | Rp | 322.150.000 |
| Realisasi fisik | | 94% |
| Realisasi keuangan | Rp | 301.285.352 |
- Keterangan :

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
- | | | |
|--------------------|----|------------|
| Jumlah anggaran | Rp | 26.000.000 |
| Realisasi fisik | | 98% |
| Realisasi keuangan | Rp | 25.586.000 |
2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran
- | | | |
|-----------------|----|------------|
| Jumlah anggaran | Rp | 41.000.000 |
| Realisasi fisik | | 83% |

	Realisasi keuangan	Rp	34.075.500
3.	Pengadaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		
	Jumlah anggaran	Rp	495.800.000
	Realisasi fisik		63%
	Realisasi keuangan	Rp	310.809.012
	Keterangan : Penghematan BBM		
4.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		
	Jumlah anggaran	Rp	15.000.000
	Realisasi fisik		99%
	Realisasi keuangan	Rp	14.908.575
5.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat- alat Kantor		
	Jumlah anggaran	Rp	10.000.000
	Realisasi fisik		60%
	Realisasi keuangan	Rp	6.000.000
6.	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor		
	Jumlah anggaran	Rp	246.700.000
	Realisasi fisik		99%
	Realisasi keuangan	Rp	244.101.000
7.	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional		
	Jumlah anggaran	Rp	100.000.000
	Realisasi fisik		99%
	Realisasi keuangan	Rp	98.835.000
	Keterangan :		

III . Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Jumlah anggaran	Rp	16.500.000
Realisasi fisik		100%
Realisasi keuangan	Rp	16.456.000

Keterangan :

2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah anggaran	Rp	300.200.000
Realisasi fisik		99%
Realisasi keuangan	Rp	298.064.000

Keterangan :

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah anggaran	Rp	20.000.000
Realisasi fisik		75%
Realisasi keuangan	Rp	15.000.000

Keterangan : Sisa setoran diklat

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan

Jumlah anggaran	Rp	20.000.000
Realisasi fisik		0%
Realisasi keuangan	Rp	-

Keterangan : Peralihan/ pergeseran dana ke kegiatan lain

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan pencapaian Kinerja dan iktisar
Jumlah anggaran Rp 30.385.000
Realisasi fisik 33%
Realisasi keuangan Rp 10.075.000
Keterangan : Honorarium Website hanya realisasikan 2 bulan

VI. Program Perencanaan SKPD

1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Jumlah anggaran Rp 2.500.000
Realisasi fisik 100%
Realisasi keuangan Rp 2.500.000

VII. Program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan

1. Bimbingan teknis, Diklat dan sosialisasi Penanganan Bencana
Jumlah anggaran Rp 187.040.000
Realisasi fisik 96%
Realisasi keuangan Rp 178.998.825
Keterangan : Sewa Peralatan Outbond tidak terealisasi semua karena sewa peraltan hanya sebagian saja dengan alasan damkar telah memiliki peralatan outbond tersendiri.
2. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kebencanaan
Jumlah anggaran Rp 1.812.718.000
Realisasi fisik 97%
Realisasi keuangan Rp 1.758.869.500
Keterangan :

3. Pengadaan Logistik Mitigasi Bencana.

Jumlah anggaran	Rp	46.022.000
Realisasi fisik		87%
Realisasi keuangan	Rp	40.172.350

Keterangan : Belanja Makanan dan Minuman Peserta dan Panitia tidak direalisasikan semuanya.
4. Pencegahan Dan Pengendalian Kebencanaan

Jumlah anggaran	Rp	211.300.000
Realisasi fisik		100%
Realisasi keuangan	Rp	211.300.000
5. Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Jumlah anggaran	Rp	137.350.000
Realisasi fisik		98%
Realisasi keuangan	Rp	134.446.350
6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran

Jumlah anggaran	Rp	1.189.710.000
Realisasi fisik		99%
Realisasi keuangan	Rp	1.180.104.700
7. Kegiatan Kemitraan Asuransi Jiwa Dan Kesehatan Satuan Tugas Kebencanaan

Jumlah anggaran	Rp	27.500.000
Realisasi fisik		98%
Realisasi keuangan	Rp	27.000.000
11. Kegiatan Rekrutment Tenaga Sukarela Penanggulangan

Jumlah anggaran	Rp	2.608.650.000
Realisasi fisik		100%
Realisasi keuangan	Rp	2.608.650.000

12. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebencanaan

Jumlah anggaran Rp 200.000.000
Realisasi fisik 96%
Realisasi keuangan Rp 192.841.000

13. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Jumlah anggaran Rp 136.440.000
Realisasi fisik 45%
Realisasi keuangan Rp 61.650.000

Keterangan : Belanja ATK, Cinderamata/ Souvenir, Bahan Percontohan, Cetak, dan Belanja Penggandaan tidak terealisasi.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kegiatan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi untuk mencapai sasaran – sasaran yang telah ditetapkan dibiayai melalui anggaran Belanja Langsung dan Anggaran Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari APBD Kota Jambi.

Tabel III. 3 Distribusi dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2017
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

No	Jenis Anggaran	Sumber Dana	Jumlah
1	Belanja Langsung	APBDP	Rp 8.964.500.000
2	Belanja Tidak Langsung	APBDP	Rp 6.414.653.462
JUMLAH			Rp 15.379.153.462

Penggunaan dana-dana ini di implementasikan dalam kegiatan rutin Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Pengendalian terhadap program dan keuangan dilakukan sedemikian

rupa untuk menghindari terjadinya in efisiensi dan in efektifitas dalam penggunaan dana.

Realisasi penggunaan dana pada kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. III.4 Realisasi Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2017
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

No.	Jenis Anggaran	Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa (Rp)	Ket
				(RP)	%		
1	Belanja Langsung	APBDP	8.964.500.000		95,54	382.287.638.	
2	Belanja Tidak Langsung	APBDP	6.414.653.462		0	335.079.185.	
Jumlah			14.939.426.933	14.222.060.110	95,19	717.366.770.	

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut secara umum adalah:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta sarana prasarana.
2. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Permasalahan ini dikarenakan :

- a. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
 - b. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif;
 - c. Keterbatasan alokasi anggaran dari APBD.
3. Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/institusi Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota, dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat.

2. Solusi

Sebagai solusi atas berbagai permasalahan tersebut, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi perlu mengoptimalkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana sehingga upaya penanggulangan bencana secara komprehensif dan sistematis dapat terpadu dengan kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan RTRW, Kota Jambi yang memiliki kawasan rawan bencana diantaranya kawasan rawan kebakaran. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran dalam menyelenggarakan proses Pemadaman, terutama kegiatan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan berupa pengurangan

risiko bencana. Sehingga tantangan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran untuk membuat secara lengkap dan detail analisis risiko bencana dan peta rawan bencana termasuk bencana alam, non alam dan social.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi merupakan respont dari Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta PP Nomor : 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini memuat pertanggung jawaban pelaksanaan rencana dan program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 secara transparan tentang keberhasilan, kegagalan, permasalahan, dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi serta strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Dari penyusunan LAKIP tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi ini dapat kami laporkan pencapaian realisasi anggaran belanja langsung adalah 93,08% dan tingkat pencapaian kinerja (efisiensi) anggaran sebesar 93,29%.

B. SARAN

Berkenaan dengan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi tahun 2017, kami harapkan semua pihak yang terkait untuk berkoordinasi dalam penanggulangan kebakaran, mendukung dan merealisasikannya terutama jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, untuk bekerja lebih aktif dan Efektif, supaya tujuan dan sasaran program akan tercapai dan terlaksana dengan baik.